

**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKj-IP SKPD Dinas Pendidikan tahun 2019 mengacu kepada Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara ReviU Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019.

Disamping itu, LKjIP disusun dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan ini meskipun belum maksimal, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penyusunan LKjIP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019

Sumbang saran untuk perbaikan penyusunan pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga penyusunan LKjIP tahun berikutnya dapat lebih berkualitas.

Praya,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah



H. SUMUM, S.Pd.,S.H.,M.Pd
NIP.196312311987031325

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	1
I.2 Data Kepegawaian
I.3 Permasalahan
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
II.1. Rencana Strategis OPD
II.2 Perjanjian Kinerja
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. Capaian Kinerja Organisasi
III.2. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2018
III.3. Analisis Capaian Kinerja
III.4. Evaluasi Pencapaian Tujuan Strategis SKPD
III.5. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV : PENUTUP
Lampiran-lampiran		

Dalam Perjanjian Kinerja 2019 ditetapkan tiga sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. Ketiga sasaran strategis tersebut, meliputi 1).meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, dengan indikator kinerja PAUD Terakreditasi A dan APK PAUD serta Angka Melek Huruf usia 15-55 tahun. 2).meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar, dengan indikator SD Terakreditasi A, SMP Terakreditasi A, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, ABK Terlayani Pendidikan Inklusif, 3).meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja PTK PAUD, SD dan SMP bersertifikasi

Dari ketiga sasaran strategis tersebut rata-rata pencapaiannya adalah sebagai berikut: 1).meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat rata-rata capaian kinerja 100,42% atau kategori Baik, 2).meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar rata-rata capaian kinerja 102,88% atau kategori baik, dan 3).meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan rata-rata capaian kinerja 100,72% atau kategori Baik

Dari total anggaran sebesar Rp. 140.794.286.519,38 terdiri dari Belanja Langsung Rp. 50.245.486.519,38 (35,69) dan dana BOS Rp. 90.548.800.000,00 (64,31%) yang dijabarkan kedalam 6 program utama dan 4 program pendukung dengan 47 kegiatan, terealisasi sebesar Rp.139.579.586.504 (99,140%).

Dari beberapa indikator sasaran strategis terdapat beberapa indikator yang tingkat pencapaiannya masih dibawah target yang ditetapkan, misalnya lembaga PAUD terakreditasi A, dari 335 lembaga PAUD yang telah terakreditasi B dan C mencapai 47,46% sedangkan belum terdapat lembaga PAUD yang terakreditasi A sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini disebabkan karena lemahnya kapasitas manajemen satuan pendidikan, kurangnya sarana-prasarana, sistem kearsipan yang lemah, belum sinkronnya program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan RKS sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan.

Beberapa solusi telah dilakukan, antara lain dengan peningkatan kapasitas manajemen satuan pendidikan melalui pelatihan dan workshop, pembinaan secara berjenjang melalui pelaksanaan supervisi akademik dan manajerial oleh pengawas pendidikan.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

- 1). Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan dibidang pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember 2019 adalah sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah
Keadaan 31 Desember 2019

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON	
	a. II b	1
	b. III a	1
	c. III b	4
	d. IV a	27
	e. IV b	12
2.	JABATAN FUNGSIONAL	
	1. Fungsional Guru (TK, SD, SMP)	3.906
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) Golongan IV	1.846
	(2) Golongan III	1.664
	(3) Golongan II	396
	b. Pendidikan	
	(1) S3	-
	(2) S2	59
	(3) S1/D4	3.788
	(4) D3	4
	(5) D2	55
	(6) D1	-
	2. Fungsional Pengawas (TK, SD, SMP)	
	a. Pangkat/Golongan	86
	(1) Golongan IV	86
	(2) Golongan III	
	b. Pendidikan	
	(1) S3	1
	(2) S2	14
	(3) S1/D4	71
	3. Fungsional Perencana	1
3.	JABATAN STUKTURAL	

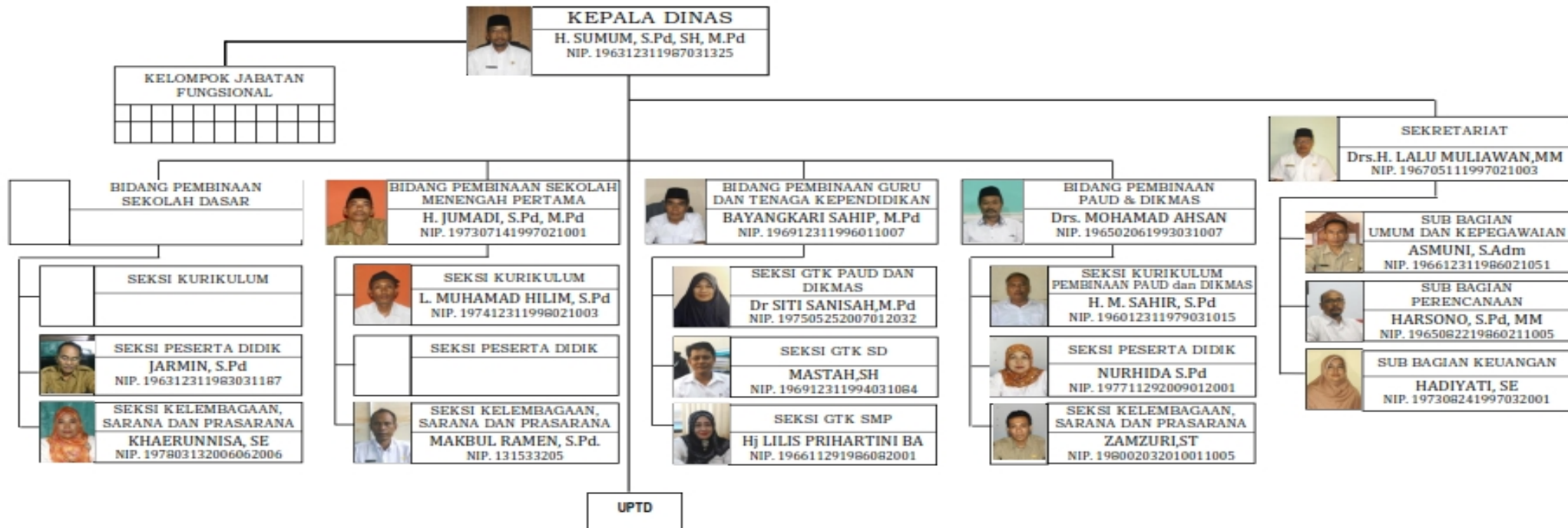
NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
	a. Pangkat/Golongan	147
	(1) IV	15
	(2) III	95
	(3) II	35
	(4) I	2
	b. Pendidikan	147
	(1) S3	1
	(2) S2	8
	(3) S1/D4	78
	(4) D3	5
	(5) D2	1
	(6) D1	
	(7) SMA Sederajat	48
	(8) SMP Sederat	3
	(9) SD Sederajat	3

I.3 Struktur Organisasi

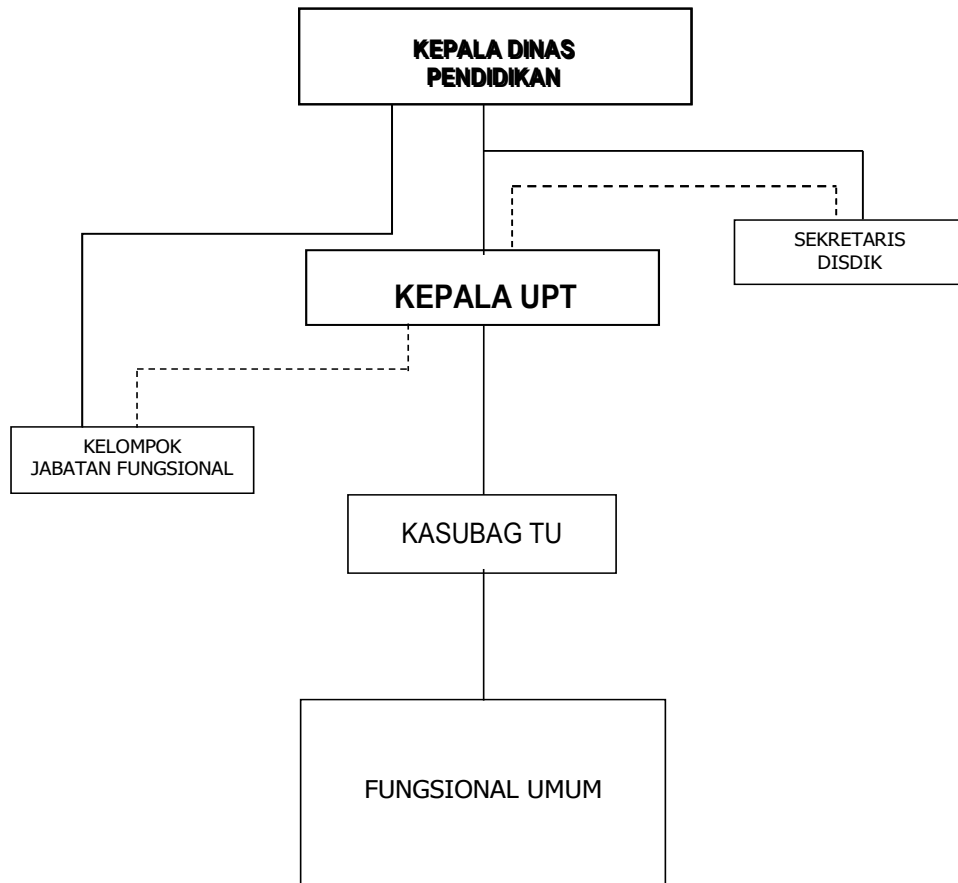
Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagai berikut:

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 63 Tahun 2016
 Tanggal : Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
 Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

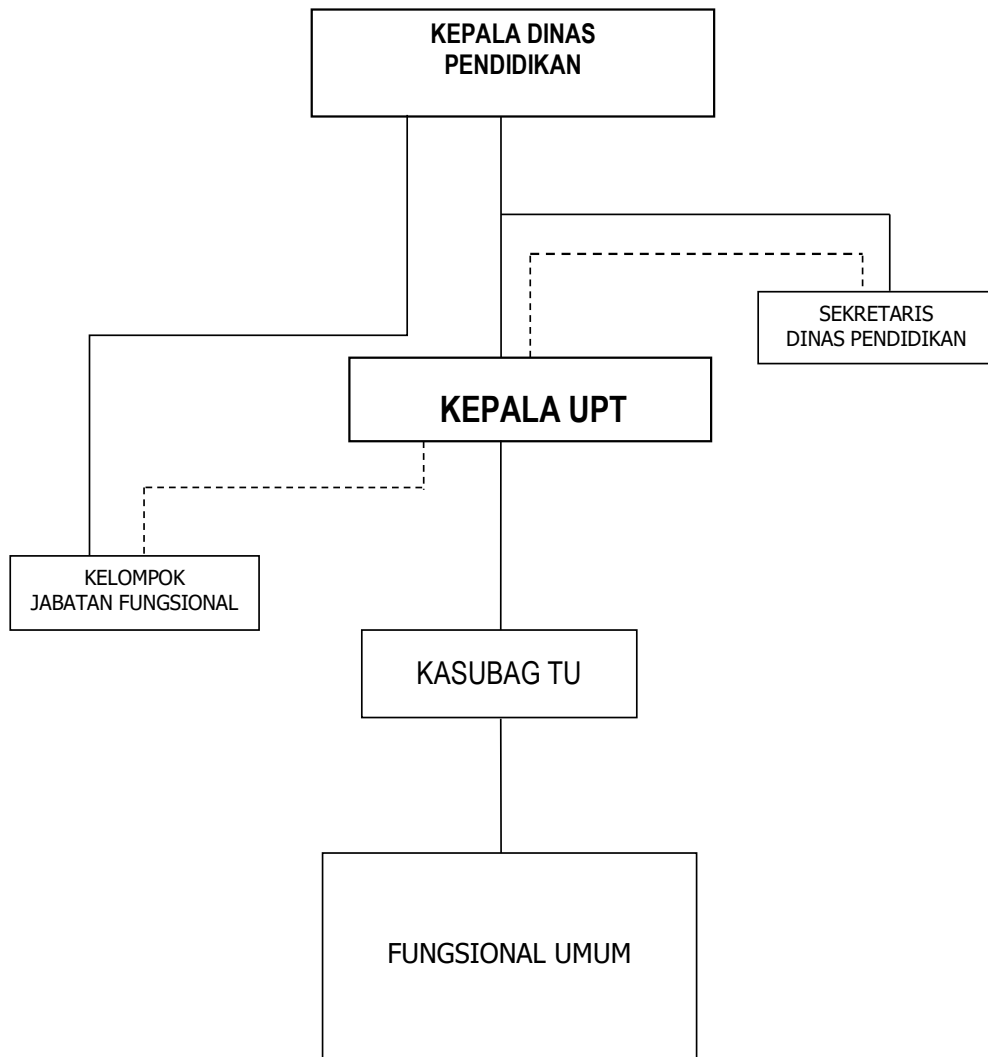
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PAUD dan DIKDAS



STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SKB LOMBOK TENGAH



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti UU tersebut, Dinas Pendidikan telah menyusun Renstra Tahun 2016–2021 yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan serta sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan telah mendasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

II.1 Rencana Strategis OPD

Dinas Pendidikan sebagai salah satu OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun Renstra yang sinkron dan mengacu RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dengan fokus prioritas peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Dengan tersusunnya Renstra 2016-2021, berarti Dinas Pendidikan telah menetapkan perencanaan yang berisi visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Perencanaan strategis Dinas Pendidikan, secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Tengah ke depan, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang

bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama.

Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- (1) kata 'beriman' berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- (2) kata 'sejahtera' berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- (3) kata 'bermutu' berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2. Pernyataan Misi

Misi Dinas Pendidikan merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Rumusan misi Dinas Pendidikan yang merupakan misi kedua Kabupaten Lombok Tengah adalah:

“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan Dan Kesetaraan Gender”

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global.

3. Tujuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Pendidikan menetapkan tujuan utama yaitu **meningkatkan kualitas pendidikan.**

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis yang disusun Dinas Pendidikan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- (2) Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar
- (3) Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
- (4) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Pendidikan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya Kualitas pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	PAUD Terakreditasi A
		APK PAUD
		Angka Melek Huruf usia 15-55 tahun
	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	SD Terakreditasi A
		SMP Terakreditasi A
		APK SD/MI/Paket A
		APK SMP/MTs/Paket B
		APM SD/MI/Paket A
		APM SMP/MTs/Paket B
		ABK Terlayani Pendidikan Inklusif
	Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	PTK PAUD bersertifikasi
		PTK SD bersertifikasi
		PTK SMP bersertifikasi

6. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai bagaimana Dinas Pendidikan akan mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana prasarana PAUD 2. Pengembangan kurikulum PAUD 3. Pembangunan sarana prasarana Pendidikan non formal

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar 2. Pengembangan kurikulum pendidikan dasar 3. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 4. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin 5. Pemenuhan SPM pendidikan dasar 6. Pengembangan system informasi dan manajemen pendidikan
Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas PTK

7. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran	Program/kegiatan
1	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Kegiatan Penambahan ruang kelas sekolah 1.2. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.3. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.4. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.5. Kegiatan Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.6. Kegiatan Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.7. Kegiatan Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pengembangan pendidikan keaksaraan 2.2. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
2	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SD/MI 1.2. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI 1.3. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI 1.4. Kegiatan Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI 1.5. Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI 1.6. Kegiatan Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI 1.7. Kegiatan Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.8. Kegiatan Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI 1.9. Kegiatan Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs 1.10. Kegiatan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs 1.11. Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs

No	Sasaran	Program/kegiatan
		1.12. Kegiatan Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs 1.13. Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs 1.14. Kegiatan Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs 1.15. Kegiatan Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah SMP/MTs 1.16. Kegiatan Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs 1.17. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Karakter dan Siswa Berprestasi SMP/MTs 1.18. Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI 1.19. Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs 2. Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) 2.1. Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS 2.2. Kegiatan Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar
3	Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) 1.1 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.2 Kegiatan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1.3 Kegiatan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan 1.4 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.5 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.6 Kegiatan Pengembangan kualitas literasi dan numerasi guru

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019	Ket
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	PAUD Terakreditasi A	1,11	RENSTRA
	APK PAUD	78,09	RPJMD
	Angka Melek Huruf usia 15-55 tahun	81,94	RPJMD
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	SD Terakreditasi A	5,18	RENSTRA
	SMP Terakreditasi A	10,06	RENSTRA
	APK SD/MI/Paket A	109,99	RPJMD
	APK SMP/MTs/Paket B	101,25	RPJMD
	APM SD/MI/Paket A	98,86	RPJMD
	APM SMP/MTs/Paket B	98,75	RPJMD
Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	ABK Terlayani Pendidikan Inklusif	79,30	RPJMD
	PTK PAUD bersertifikasi	91,56	RPJMD
	PTK SD bersertifikasi	93,85	RPJMD
	PTK SMP bersertifikasi	90,09	RPJMD

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp.140.794.286.519,38 (Seratus empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan belas koma tiga puluh delapan rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2 Capaian Kinerja Organisasi

Dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019, Dinas Pendidikan melakukan penilaian internal untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolok ukur keberhasilan

dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Capaian kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis
Tahun 2019 dan 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian 2019	Realisasi 2018
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	PAUD Terakreditasi A	persen	1,11	22,39	100	3,39
	APK PAUD	persen	78,09	78,15	100,08	68,11
	Angka Melek Huruf usia 15-55 tahun	persen	88,82	89,87	101,18	89,34
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	SD Terakreditasi A	persen	5,18	5,79	111,78	5,46
	SMP Terakreditasi A	persen	10,06	9,50	94,43	8,94
	APK SD/MI/Paket A	persen	109,99	110,70	100,65	109,20
	APK SMP/MTs/Paket B	persen	101,25	103,35	102,07	106,96
	APM SD/MI/Paket A	persen	98,86	98,89	100,03	99,98
	APM SMP/MTs/Paket B	persen	98,75	98,81	100,06	98,31
	ABK Terlayani Pendidikan Inklusif	persen	79,30	79,42	100,15	87,21
Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	PTK PAUD bersertifikasi	persen	91,56	96,58	105,48	90,91
	PTK SD bersertifikasi	persen	93,85	90,46	96,39	93,60
	PTK SMP bersertifikasi	persen	90,09	90,36	100,30	88,67

III.3 Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian masing-masing indikator sasaran strategis dilakukan beberapa analisis antara lain 1). Membandingkan antara target tahun 2019 dan realisasi kinerja tahun 2019, 2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, 3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target renstra, 4). Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional, 5). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, 6). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan 7). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Indikator Kinerja PAUD Terakreditasi

1.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator kinerja kesatu dari sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat adalah lembaga PAUD Terakreditasi.

Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya. Serta untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional.

Pada tahun 2019 indikator PAUD Terakreditasi ditargetkan 1,11% dari 335 PAUD Formal terealisasi 22,39% (75 lembaga PAUD Formal terakreditasi B dan C) belum ada lembaga PAUD yang terakreditasi A.

1.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2018 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 19,40% pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 2,99% menjadi 22,39%. Demikian halnya jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian kinerja indikator sasaran strategis ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 17,91%.

1.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019 jumlah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 42.926 lembaga, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, lembaga PAUD Terakreditasi pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 1,11% dari total 335 lembaga PAUD Formal. Sampai dengan tahun 2019 dari 335 lembaga PAUD Formal telah terakreditasi sebanyak 22,39% atau 75 lembaga.

1.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar yang menjadi acuan, tetapi sesuai dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini setiap lembaga PAUD wajib dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

1.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, semakin baiknya mutu dan kualitas manajemen penyelenggaraan, Dinas Pendidikan terus menerus melakukan berbagai pengembangan pendidikan anak usia melalui kegiatan penguatan kapasitas manajemen pengelola, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berjenjang.

1.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berbagai ikhtiar telah dilakukan dalam upaya pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan diantaranya penyediaan dana bagi penyelenggaraan dan pengembangan PAUD serta pengalokasian anggaran. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 11.156.345.367 terealisasi sebesar Rp.10.822.482.600,00 (97,00%) dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal, pelatihan berjenjang bagi guru PAUD, pelatihan K13, penyediaan APE, Honor bagi 1000 orang guru PAUD.

1.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja ini, antara Proram Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
- (2) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD
- (3) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- (5) Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini
- (6) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- (7) Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

2. Indikator Kinerja APK PAUD

2.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator kinerja kedua dari sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat adalah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan.

Pada tahun 2019 indikator kinerja ini ditargetkan 78,09% dan terealisasi 78,15% atau 100,08% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kinerja jika dilihat dari segi pemerataan dan akses pendidikan meskipun pencapaiannya belum signifikan.

2.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2018 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini mencapai 68,11% pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,04.% menjadi 78,15%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian kinerja indikator sasaran strategiis ini mengalami peningkatan/penurunan sebesar 10,37%.

2.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019 APK PAUD pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 78,70%, sedangkan dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, APK PAUD pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 78,09%, lebih rendah 0,61% dari Target Nasional. Sampai dengan tahun 2019 APK PAUD telah terealisasi sebesar 78,15% artinya telah melampaui target yang ditetapkan meskipun sangat kecil.

2.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Demikian pula halnya dengan indikator angka partisipasi kasar, idialnya pencapaian untuk indikator ini adalah 100%. Jika masih belum mencapai 100% berarti masih ada anak usia sekolah yang belum terlayani di satuan pendidikan PAUD, sebaliknya jika angka partisipasi kasar lebih dari 100% dapat diasumsikan bahwa terdapat anak diluar usia sekolah atau terdapat anak yang tinggal kelas.

2.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain, semakin baiknya mutu dan kualitas manajemen penyelenggaraan, Dinas Pendidikan terus menerus melakukan berbagai pengembangan pendidikan anak usia melalui kegiatan penguatan kapasitas manajemen pengelola, penguatan kapsitas guru melalui pelatihan berjenjang.

2.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Seperti halnya untuk mencapai indikator lembaga PAUD Terakreditasi, untuk mencapai indikator kinerja APK PAUD pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan PAUD baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN sebesar Rp. 11.156.345.367 terealisasi sebesar Rp.10.822.482.600,00 (97,00%)dari pagu anggaran. Dana tersebut dianggarkan untuk BOP bagi 853 lembaga PAUD Formal dan Non Formal, pelatihan berjenjang bagi guru PAUD, pelatihan K13, penyediaan APE, Honor bagi 1000 orang guru PAUD.

2.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Seperti halnya program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Lembaga PAUD Terakreditasi, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja APK PAUD antara lain Proram Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara lain:

- (1) Penambahan ruang kelas sekolah PAUD
- (2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- (4) Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

3. Indikator Kinerja Angka Melek Huruf usia 15-55 tahun

3.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator kinerja ketiga dari sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat adalah Persentase Angka Melek Huruf usia 15-55 tahun.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Lombok Tengah masih tercatat sebagai Kabupaten yang memiliki angka buta huruf tertinggi, sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah penduduk penyandang buta aksara mencapai 57.702 orang.

3.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk penyandang buta aksara sebesar 64.932 orang, selama tahun 2019 telah dibelajarkan sebanyak 7.232 orang sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 masih tersisa sebanyak 57.702 orang penduduk penyandang buta aksara. Pada tahun 2017 jumlah penduduk buta aksara mencapai 70.032 orang, pada tahun 2018 menurun menjadi 64.932 orang. Artinya selama kurun waktu tahun 2017-2019 jumlah penduduk penyandang buta aksara hanya mampu dituntaskan sebanyak 16.230 orang. Sedangkan persentase melek huruf pada tahun 2019 meningkat% dibanding tahun 2018.

3.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 indikator kinerja persentase angka melek huruf pada tahun 2019 dalam renstra ditargetkan sebesar 88,82% dan terealisasi 89,87% atau 101,18% dari target. Jika mengacu kepada renstra

Kemdikbud RI Tahun 2015-2019 capaian indikator kinerja sasaran strategis ini masih dibawah target renstra Kemdikbud RI yaitu tahun 2019 yaitu sebesar 98%.

3.4) Analisis perebandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Secara nasional, Standard Ideal Indikator Pemerataan Pendidikan khususnya APK PAUD adalah 100%. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.

3.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Ketidakberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh belum akuntabelnya data yang ada

3.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.298.520.000 dan terealisasi Rp. 1.215.235.070,00 (94,00%)

3.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian ini adalah program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan antara lain, kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan dan kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup.

4. Indikator Kinerja SD dan SMP Terakreditasi A

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir.

4.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019 ditargetkan 5,18% (31 SD) dari 604 SD Terkareditasi A dan terealisasi 5,79% (35 SD). Sedangkan SMP ditargetkan 10,06% (18 SMP) dari 179 SMP terakreditasi A.

4.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun 2018 jumlah SD yang terkareditasi A sebanyak 5,46% dari 604 SD, meningkat sebesar 0,33% menjadi 5,79% pada tahun 2019, sedangkan jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 capaian kinerja indikator sasaran strategiis ini mengalami peningkatan sebesar 1,82%.

Untuk jenjang SMP, pada tahun 2018 jumlah SMP terkreditasi A sebesar 8,94% (16 SMP) dari 179 SMP meningkat sebesar 0,56% menjadi 9,50% pada tahun 2019 dan jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian kinerja indikator sasaran strategiis ini mengalami peningkatan sebesar 2,80%.

4.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Jika mengacu kepada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019, persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 84,20% sedangkan persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B ditargetkan 81,00%.

Dalam renstra Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 SD terakreditasi A pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,18% terealisasi 5,79% atau 111,78%% dari target, sedangkan SMP terakreditasi A ditargetkan sebesar 10,06% terealisasi 9,50% atau 94,43% dari target renstra.

4.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar untuk menentukan berapa besaran satuan pendidikan baik SD maupun SMP yang harus terakreditasi. Dalam peraturan

4.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kecuali jenjang SD, jenjang SMP dari 10,06% SMP Terakreditasi A yang ditargetkan hanya tercapai 9,50% atau 94,43% dari target renstra. Ketidaktercapaian ini disebabkan karena:

- 1) Belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pembiayaan.
- 2) Penataan arsip dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang tidak tertib
- 3) Implementasi program dan kegiatan tidak sesuai RKS yang ada

4.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan pagu dana yang ada, untuk mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pendidikan pada tahun 2019 mengalokasikan sebesar Rp.77.150.000 melalui kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah.

4.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang baik langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan program peningkatan mutu pendidik dan kependidikan.

5. Indikator Kinerja APK SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota atau terletak pada daerah perbatasan. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan daerah.

5.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019 Indikator Kinerja APK SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B ditargetkan sebesar 109,99% dan 101,25%, dari target tersebut APK SD/MI/Paket A terealisasi 110,70% atau 100,65% dari target sedangkan APK SMP/MTs/Paket B terealisasi 103,35% atau 102,07% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa dari tiga pilar pendidikan, pemerataan dan akses pendidikan bagi penduduk usia sekolah telah tercapai.

5.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2018 realisasi capaian kinerja APK SD/MI/Paket A 109,20% meningkat 1,50% menjadi 110,70% pada tahun 2019. sedangkan dan APK SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan sebesar 3,61% dari 106,96% menjadi 103,35%., penurunan ini bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja Dinas Pendidikan, tetapi lebih disebabkan karena semakin berkurangnya jumlah penduduk diluar usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2017 baik APK SD/MI/Paket A maupun APK APK SMP/MTs/Paket B mengalami penurunan.

5.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan tahun 2016-2021, APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B ditargetkan 109,99% dan 101,25%. Sampai dengan tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan renstra telah terealisasi 110,73% dan 103,35%.

5.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Secara nasional, Standard Ideal Indikator Pemerataan Pendidikan khususnya APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B adalah 100%. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan di daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu.

5.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa penyebab target keberhasilan/kegagalan APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B dapat tercapai antara lain:

- Tersedianya akses bagi penduduk usia sekolah, meningkatnya jumlah daya, akses transportasi
- Tersedianya dana bantuan operasional sekolah, mampu mencegah dan mengurangi siswa putus sekolah

5.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai target indikator kinerja ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.121.092.828.352 melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

5.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

- 1). Kegiatan Utama
 - (1) Pembangunan gedung sekolah SD/MI
 - (2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI
 - (3) Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs
 - (4) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs
- 2). Kegiatan Pendukung
 - (1) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI
 - (2) Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI

- (3) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI
- (4) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
- (5) Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI
- (6) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs
- (7) Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs
- (8) Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs
- (9) Pembinaan Pendidikan Karakter dan Siswa Berprestasi SMP/MTs
- (10) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI
- (11) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs

6. Indikator Kinerja APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya 100%. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.

6.1) Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 realisasi indikator kinerja APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B rata-rata menunjukkan peningkatan kinerja terutama pada jenjang SMP. Pada tahun 2018 realisasi APM SD/MI/Paket A sebesar 99,98% menurun pada tahun 2019 menjadi 98,89%, sedangkan APM SMP/MTs/Paket B meningkat dari 98,31% menjadi 98,75% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM=100%, bila lebih besar dari 100% karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan.

6.2) Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 realisasi indikator kinerja APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B pada tahun 2019 rata-rata menunjukkan penurunan kinerja. Pada tahun 2017 dan 2018 realisasi mencapai 99,97% dan 99,98% pada tahun 2019 meningkat 0,01% menjadi 99,99%. Hal ini menunjukkan makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM=100%, bila lebih besar dari 100% karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota,

6.3) Analisis Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 kedua indikator ini yaitu APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B ditargetkan pada akhir periode Renstra adalah 100%. Artinya pada tahun 2021 tidak ada lagi siswa di luar usia SD dan SMP yang masih berada di satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Demikian halnya siswa tinggal kelas pada tahun 2021 atau pada akhir periode renstra ditargetkan 0%.

6.4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

Secara nasional, Standard Ideal Indikator Pemerataan Pendidikan khususnya APM untuk SD dan SMP adalah 100%. makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah dan di tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM=100%, bila lebih besar dari 100% karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah bersekolah di daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota,

6.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa penyebab keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja APM adalah, kemudahan akses bagi penduduk usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai jenjang usianya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Lombok Tengah. Sampai dengan akhir tahun 2019 berdasar data dapodik (<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>) jumlah SD/MI adalah 903 lembaga dan SMP/MTs sebanyak 461 lembaga sedangkan jumlah siswa SD/MI sebanyak 90.804 orang dan siswa SMP/MTs sebanyak 25.329 orang siswa, hal ini menunjukkan bahwa dari sisi akses penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs telah terpenuhi.

6.6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan pencapaian indikator APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B yang telah memenuhi target , hal ini berkorelasi dengan besarnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pagu dana untuk kegiatan pembangunan pendidikan melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 121.092.828.352

6.7) Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program dan kegiatan utama dan pendukung baik secara langsung maupun tidak langsung menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

- 1). Kegiatan Utama
 - (1) Pembangunan gedung sekolah SD/MI
 - (2) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI
 - (3) Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs

- (4) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs
- 2). Kegiatan Pendukung
 - (1) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI
 - (2) Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI
 - (3) Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI
 - (4) Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
 - (5) Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SD/MI
 - (6) Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs
 - (7) Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs
 - (8) Pelaksanaan UN/UAS Pendidikan Dasar SMP/MTs
 - (9) Pembinaan Pendidikan Karakter dan Siswa Berprestasi SMP/MTs

7. Indikator Kinerja Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Terlayani Pendidikan Inklusif

Pada prinsipnya setiap anak usia sekolah berhak dan wajib mengikuti pendidikan yang bermutu. Namun demikian, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa kendala dalam mengikuti pendidikan antara lain sifat disabilitasnya. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu bergabung dengan anak-anak pada umumnya di sekolah reguler yang disebut dengan pendidikan inklusif, atau mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa.

Karena keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lombok Tengah, Pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi pemberian akses pendidikan kepada semua anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan bersama-sama anak yang lain.

7.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sejak tahun 2012 tepatnya tanggal, 24 September 2012 telah dicanangkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Sebelum pencanangan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif baru 12 lembaga (10 SD dan 2 SMP) meningkat menjadi 121 lembaga (84 SD dan 37 SMP) dengan jumlah peserta didik mencapai 449 orang.

7.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 pencapaian tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan baik jumlah sekolah penyelenggara inklusif maupun jumlah peserta didik. Sampai dengan tahun 2019 jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 121 lembaga (84 SD dan 37 SMP) dengan jumlah peserta didik mencapai 449 orang.

7.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan indikator kinerja sasaran strategis ini pada tahun 2019 ditargetkan anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh akses pendidikan harus terlayani sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dimiliki. Dengan berbagai usaha dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah/lembaga non pemerintah dan masyarakat lain target tersebut dapat tercapai meskipun belum signifikan.

7.4) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Belum terdapat standar secara nasional untuk mengukur tingkat ketercapaian dan keberhasilan indikator kinerja sasaran strategis ini tetapi secara umum idealnya semua anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan akses dan layanan secara maksimal tanpa melihat latarbelakang peserta didik sesuai dengan tujuan ke-4 SDGs yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

7.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah anak dengan memberikan seluas-luasnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk belajar bersama teman sebayanya di sekolah reguler yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini adalah bahwa sejak awal pencaanangan, dukungan dan partisipasi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat, hal ini dapat dilihat dari semakin terbukanya orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya yang memiliki kebutuhan khusus disamping adanya dukungan dan komitmen pemerintah kabupaten serta lembaga pemerintah dan non pemerintah, seperti bantuan Pemerintah Australia melalui program INOVASI dan program SETARA serta dari Yayasan Plan Indonesia melalui Yayasan Sumberdaya Lingkungan dan Pelestarian Pembangunan (YSLPP), dukungan Penguruan Tinggi (UNRAM) melalui Program Kemitraan antara UNRAM-Program INOVASI NTB-Dinas Pendidikan turut mempercepat pencapaian indikator kinerja ini.

7.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berbagai ikhtiar telah dilakukan baik melalui program maupun penganggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun kerjasama kemitraan dengan lain untuk mencapai target indikator kinerja ini. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.225.000.000,00 melalui program Pendidikan Luar Biasa (PLB). Digunakan untuk peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan inklusif maupun peningkatan kapasitas guru melalui program Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bekerjasama dengan UNESA Surabaya.

7.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari ke-5 program teknis yang ada pada tahun 2019, yaitu 1).Program Pendidikan Anak Usia Dini, 2).Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Program Pendidikan Non Formal, 4). Program Pendidikan Luar Biasa, 5). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Luar Biasa (PLB) adalah program teknis yang secara langsung menunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini.

8. Indikator Kinerja PTK PAUD, SD dan SMP Bersertifikasi

8.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019 indikator kinerja PTK PAUD, SD dan SMP bersertifikasi masing-masing ditargetkan sebesar, 91,56%, 93,86% dan 90,09%. Dari data yang ada pada Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan diketahui bahwa jumlah PTK PAUD, SD dan SMP yang telah bersertifikasi adalah sebagai berikut :

- (1) PTK PAUD telah bersertifikasi 96,58% atau 105,48% dari target yang ditetapkan.
- (2) PTK SD telah bersertifikasi 90,46% atau 96,39% dari target yang ditetapkan
- (3) PTK SMP telah bersertifikasi 90,36% atau 100,30% dari target yang ditetapkan

8.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 dan 2018 realisasi tahun 2019 ini mengalami peningkatan yang cukup mengembirakan. PTK PAUD bersertifikasi yang pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 90,48% dan 90,91% pada tahun 2019 meningkat menjadi 96,58%, kemudian PTK SD bersertifikasi jika pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 90,13% dan 93,60% pada tahun 2019 terealisasi 90,46%. Sedangkan PTK SMP bersertifikasi jika pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 84,57% dan 88,67% pada tahun 2019 meningkat menjadi 90,36%

8.3) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi.

Sampai dengan tahun 2019 realisasi ketiga indikator kinerja sasaran ini jika dibandingkan dengan target renstra tahun 2016-2017 rata-rata capainnya melampaui target yang ditetapkan kecuali PTK SD yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan. PTK PAUD bersertifikasi di dalam renstra pada tahun 2019 ditargetkan 91,56% terealisasi 96,58%, PTK SD bersertifikasi di dalam renstra pada tahun 2019 ditargetkan 93,85% terealisasi 90,46% sedangkan PTK SMP bersertifikasi di dalam renstra pada tahun 2019 ditargetkan 90,09% terealisasi 90,36%.

8.4) Analisis perebandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada standar yang dijadikan acuan untuk indikator ini, tetapi idialnya seluruh guru harus memiliki sertifikat pendidik untuk memperoleh tunjangan sertifikasi pendidik.

8.5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian dari indikator ini ditentukan melalui besarnya kuota dari Kementerian Pendidikan diperoleh melalui proses/diawali dari :

- 1). Guru mengikuti Free Test PPG (Pendidikan Profesi Guru),
- 2). Guru yang dinyatakan lulus Free Test PPG berhak mengikuti pendampingan secara online oleh LPTK ,
- 3). Setelah pendampingan secara online dilanjutkan dengan Workshop PPG,
- 4). Bagi guru yang dinyatakan lulus PPG berhak memperoleh sertifikat pendidik.

8.6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.313.011.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.285.720.950,00 (99,37%).

8.7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja sasaran ini adalah program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
- (2) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
- (3) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- (4) Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

B A B IV PENUTUP

Secara umum pencapaian keenam target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat rata-rata pencapaiannya adalah 100,42% atau kategori Baik
2. Sasaran Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar, rata-rata pencapaiannya adalah 102,88% atau kategori baik.
3. Sasaran Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan rata-rata pencapaiannya adalah 100,72% atau kategori Baik.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi ketiga sasaran strategis tersebut adalah 101,34 dengan kategori Baik

Sebagai ikhtiar untuk mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 140.794.286.519,38 terdiri dari Belanja Langsung Rp. 50.245.486.519,38 (35,69) dan dana BOS Rp. 90.548.800.000,00 (64,31%) yang dijabarkan kedalam 6 program utama dan 4 program pendukung dengan 47 kegiatan, terealisasi sebesar Rp.139.579.586.504 (99,140%).

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten, Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya,
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lombok Tengah,



H.SUMUM,S.Pd.,S.H.,M.Pd.
NIP.196312311987031325